

Sekolah 5 Hari dan Pendidikan Agama

FAISAL ZAINI DAHLAN

Dosen Jurusan Studi Agama-agama IAIN Imam Bonjol Padang

PERMENDIKBUD RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, telah menjadi *blunder* terutama di media sosial, dan memunculkan pro kontra yang cukup tajam. Polemik bahkan bergeser dari analisis edukatif kepada nuansa politik setelah beberapa pihak menilai kebijakan itu tidak populis. Pedasnya kecaman kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir, mengindikasikan bahwa isu telah menjadi bola liar yang cukup ampuh digelindingkan untuk berbagai kepentingan. Meski pihak Kemendikbud telah berupaya memberikan klarifikasi untuk menjelaskan duduk perkara, tetapi polarisasi yang semakin mengkrystal terus memperuncing kontroversi. Karenanya sangat dibutuhkan penjelasan holistik untuk menjernihkan persoalan.

Dari FDS ke Isu Penghapusan Pelajaran Agama

Protes atas regulasi sekolah lima hari dengan belajar delapan jam sehari atau empat puluh jam seminggu (Pasal 2 ayat 1) masih buntut dari kontroversi *full day school* (FDS) yang digagas Muhadjir sebelumnya. Awalnya, protes atas ide ini dikaitkan akan semakin beratnya beban psikis anak karena harus belajar seharian. Tanpa FDS pun selama ini anak sudah dicekoki *berjibun* pelajaran dengan *seabreg* tugas sekolah. Kompetensi guru yang masih rendah memperparah proses edukasi, sehingga anak cenderung menjadi korban pemenuhan beban tugas guru semata. Psikologis dan intelektual anak bukannya berkembang positif, tetapi justru mengerdil di bawah beratnya tekanan. Ide meliburkan hari Sabtu untuk membangun fungsi edukatif keluarga yang semakin hilang, justru dinilai kontra produktif. Anak dikhawatirkan hanya bermain

bebas sehingga berpotensi destruktif terhadap moral dan karakternya.

Ide FDS dinilai hanya relevan bagi masyarakat urban, dan tidak tepat untuk diterapkan di pedesaan. Selain tidak efektif dan menambah beban keluarga dalam mengurus transportasi anak yang pulang sore, juga dipandang bukan kebutuhan riil. Anak-anak justru akan tercabut dari suasana pedesaan yang masih kental dengan aktivitas bermain alami sepulang sekolah. Demikian pula intensitas didikan orang tua melalui keterlibatan dalam kegiatan harian keluarga akan tergerus, padahal sangat bernilai edukatif yang tinggi. Pendek kata, dalam skala nasional secara sosio kultural ide FDS memiliki *mudharat* yang lebih besar dibanding manfaat.

Penolakan atas ide FDS ini menggelinding semakin tajam, setelah regulasi tentang sekolah lima hari diterbitkan 12 Juni lalu. Argumentasi yang dibangun bergeser kepada nasib lembaga pendidikan keagamaan Islam tradisional yang diprediksi terancam. Madrasah diniyah sore dan sejenisnya yang telah bertahan ratusan tahun dan berjumlah ratusan ribu itu, akan kehilangan santri karena mereka harus di sekolah formal hingga sore hari.

Kekhawatiran matinya madrasah diniyah, TPQ, dan sejenisnya, dijawab oleh Pasal 5 Permendikbud. Ketentuan delapan jam hari sekolah tidak semata untuk pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, tetapi juga kokurikuler dan ekstrakurikuler. Se-

dangkan ekstrakurikuler *include* di dalamnya aktivitas keagamaan meliputi madrasah diniyah, pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, *retreat*, baca tulis Al Quran dan kitab suci lainnya. Kegiatan ini dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah, dan dapat dilakukan secara kooperatif dengan lembaga keagamaan, sehingga aplikasinya bisa jadi di luar sekolah. Artinya, justru eksistensi madrasah diniyah dan sejenisnya semakin diakui dan diberdayakan, karena jam-jam aktivitas sore di lembaga ini dikonversi sebagai bagian yang sah dari delapan jam pelajaran di sekolah. Bahkan nilai hasil belajar agama anak pun bisa dikeluarkan oleh lembaga pendidikan keagamaan ini.

Tetapi isu yang berkembang malah semakin buruk, bahwa Muhadjir akan menghapus pelajaran agama di sekolah. Sejumlah kecaman pedas muncul dengan tuduhan miring yang cenderung berlebihan atas isu ini. Pihak Kemendikbud mengklarifikasi bahwa pihaknya tidak memiliki rencana penghapusan, karena meniadakan pendidikan agama tidak ada dalam agenda reformasi sekolah. Justru pendidikan keagamaan yang selama ini dirasa kurang dalam jam pelajaran pendidikan agama akan makin diperkuat melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Kembalikan ke Soal Pendidikan

Sebagian kecaman terhadap Muhadjir tampaknya tidak murni

lagi berlatar soal pendidikan. *Blunder* tentang Muhadjir telah menggelinding hingga memunculkan usulan agar kinerjanya ditinjau ulang, bahkan usul agar Presiden Jokowi *meresafelnya*. Muhadjir dituding melakukan pengkhiatanan dan memiliki agenda terselubung untuk mematikan madrasah diniyah dan sejenisnya. Selain terburu-buru dan tak berdasar, respons kecaman juga tentunya memperkeruh suasana yang sedang tidak kondusif, semakin memperuncing polarisasi yang telah terkonstruksi, serta tidak melahirkan solusi cerdas dan mencerdaskan untuk menjawab tantangan pendidikan nasional ke depan.

Karena itu, wacana dan polemik mestinya dikembalikan kepada persoalan pendidikan sebagai substansi permasalahan agar ditemukan solusi terbaik. Sebuah ide menyangkut kepentingan publik apalagi terkait hal aktual, krusial dan fundamental, tentunya mesti dikaji dalam dan luas dari berbagai aspek dan perspektif. Sebagai bagian vital kehidupan, pendidikan tidak bisa dijadikan proyek *trial and error*, apalagi *gambling* karena akan berakibat fatal bagi manusia dan kemanusiaan. Karenanya, mutlak dibutuhkan penjelasan holistik dan komprehensif lebih dari sekadar regulasi kaku dan tidak aplikatif. Selanjutnya, aturan turunan dari regulasi harus disusun teknis, berbentuk juklak dan juknis agar bisa terang benderang dipedomani.

Meski demikian, di sisi lain, tentunya hasrat memanfaatkan isu pendidikan untuk tujuan-tujuan politik dan kepentingan pragmatis, juga bukan solusi arif jika kita masih menginginkan bangsa ini maju dan berkarakter. Mari berpikir jernih *Wallahu a'lam*. (*)